

**Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Padang dalam Melakukan Koordinasi antar
Stakeholders Penanggulangan Bencana di Kota Padang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Administrasi Publik



Oleh :

NESY YULIA MURNI

NIM 15042138

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul ; Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Padang dalam melakukan Koordinasi antar
Stakeholders Penanggulangan Bencana di Kota Padang

Nama ; Nesy Yulia Murni

Nim / TM ; 15042138 / 2015

Program Studi ; Administrasi Publik

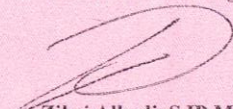
Jurusan ; Administrasi Publik

Fakultas ; Ilmu Sosial

Padang, 14 Mei 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Zikri Alhadi, S.IP,MA.
NIP. 19840606 200812 1 0003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

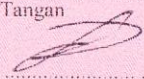
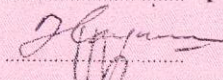
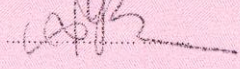
Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

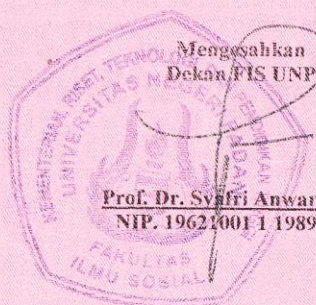
**Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Padang dalam Melakukan Koordinasi antar *Stakeholders* Penanggulangan
Bencana di Kota Padang**

Nama : Nesy Yulia Murni
NIM : 15042138
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Mei 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Zikri Alhadi, S.IP, MA	1. 
2. Anggota : Drs.Karjuni Dt.Maani, M.Si	2. 
3. Anggota : Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 1 1989 1002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	; Nesy Yulia Murni
NIM/TM	; 15042138
Tempat / Tanggal Lahir	; Padang /26 Juli 1996
Program studi	; Administrasi Publik
Jurusan	; Administrasi Publik
Fakultas	; Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul 'Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang' adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Nesy Yulia Murni

Nesy Yulia Murni

15042138/2015

ABSTRAK

**Nesy Yulia Murni (2015) : Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam
Melakukan Koordinasi antar Stakeholders
Penanggulangan Bencana di Kota Padang**

Penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa seringnya terjadi bencana alam di Kota Padang yang dikarenakan Kota Padang merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap ancaman bencana alam. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak buruk dari suatu bencana yang terjadi, maka perlunya peran pemerintah serta kerjasama dari pihak-pihak yang berwenang dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, kantor Dinas Sosial Kota Padang, kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Padang, dan Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang. Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi oleh BPBD Kota Padang belum berjalan dengan optimal. Tidak mencukupinya sumber daya manusia di BPBD Kota Padang, kurangnya tingkat pengetahuan dan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana. Adanya ketidakpuasan dari masyarakat atau korban bencana dikarenakan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian adanya tingkat mutasi yang tinggi di kantor BPBD Kota Padang yang mempengaruhi jalannya koordinasi dengan baik, dan adanya ego sektoral dari instansi terkait sehingga koordinasi yang dilakukan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada fungsi koordinasi oleh BPBD Kota Padang dengan semua *stakeholders* agar tercapainya tujuan penanggulangan bencana.

Kata kunci : Efektivitas, BPBD Kota Padang, Koordinasi, *Stakeholders*, Penanggulangan bencana

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari berbagai salah dan khilaf, baik dari segi isi, metode, maupun penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dari Bapak/Ibu tim penguji dan berbagai pihak lainnya akan penulis jadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Bapak Aldri Frinaldi,SH.,M.Hum.,Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Bapak Zikri Alhadi S.IP., M.Si, selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani,M.Si, dan ibu Nora Eka Putri,S.IP.,M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan arahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Firdaus,ST, selaku kepala sub bagian umum di kantor BPBD Kota Padang yang telah memberikan izin untuk penelitian.
6. Para informan dari kantor BPBD Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang, PMI Kota Padang serta kantor Pencarian dan Pertolongan Padang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
7. Rekan-rekan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, bapak Juliasman (Alm) dan ibu Murniati yang telah memberikan banyak dukungan moral dan materil serta doa yang tulus dan ikhlas agar anaknya berhasil mencapai kesuksesan.

Semoga Allah SWT membalas bantuan, bimbingan, motivasi, dan waktu yang telah Bapak/Ibu sekalian dengan limpahan yang berlipat ganda. Semoga pengetahuan yang telah Bapak/Ibu berikan dalam proses perkuliahan dijadikan Allah SWT sebagai ilmu yang bermanfaat. Amiin..

Padang, 14 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat penelitian.....	16
 BAB II. TINJUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Konsep Efektivitas	17
2. Konsep Kinerja.....	24
3. Konsep Koordinasi.....	28
4. Konsep Penanggulangan Bencana	34
5. Konsep Analisis SWOT	41
B. Kerangka Konseptual	44
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi penelitian	46
C. Informan Penelitian	47

D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
G. Instrumen Penelitian	53
H. Teknik Keabsahan Data	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	55
B. Temuan Khusus	61
C. Pembahasan	82
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang	2
Tabel 1.2 Daerah terdampak banjir 02 November 2018	3
Tabel 2.1 Tabel Matriks SWOT	43
Tabel 3.1 Daftar Informan	48
Tabel 4.1 <i>Stakeholders</i> yang terlibat pada operasi penanggulangan bencana banjir bulan November 2018	93
Tabel 4.2 Peralatan yang digunakan BPBD Kota Padang pada penanganan bencana banjir bulan November 2018	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. KERANGKA KONSEPTUAL	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.....	58
Gambar 4.1 Protap Penanggulangan Benana	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam adalah Kota Padang.

Kota Padang adalah Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Jika dilihat dari morfologi wilayah, Kota Padang memiliki keragaman kondisi wilayah. Sebagian besar berupa pesisir pantai, daratan rendah sampai wilayah perbukitan. Pola ruang Kota Padang lebih dominan berada di daerah pesisir pantai. Sedangkan wilayah perbukitan Kota Padang merupakan kawasan hutan dan secara geologi berada pada jalur patahan. Oleh sebab itu aktifitas masyarakat yang cukup padat berada di wilayah pesisir. Kondisi inilah yang menyebabkan Kota Padang rawan bahaya terhadap ancaman bencana alam.

Keadaan Kota Padang ini juga dapat dilihat berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kota Padang tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2	Gempa Bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,656	Sedang	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	0,861	Tinggi	0,774	Tinggi	0,427	Sedang	0,732	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10	Gagal Teknologi	0,662	Sedang	0,664	Sedang	0,302	Sedang	0,742	Sedang

Sumber :Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya bencana di Kota Padang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Bencana yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan sering terjadi di Kota Padang adalah bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Kota Padang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses interaksi kedua lempeng ini menyebabkan Kota Padang menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bahkan berpotensi tsunami. Salah satu bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kota Padang adalah bencana gempa bumi pada tanggal 30 september 2009 yang lalu. Tingkat risiko akibat bencana gempa bumi tersebut

tergolong tinggi karena besarnya kerugian materi yang ditimbulkan dan banyaknya korban jiwa berjatuh. Khusus di Kota Padang, jumlah korban jiwa yaitu korban meninggal sebanyak 316 orang, luka berat 181 orang dan luka ringan sebanyak 425 orang (Alhadi Z, 2014:35).

Kemudian selain gempa bumi, banjir juga menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyaknya permukiman di daerah rendah dan di sepanjang aliran sungai. Kejadian bencana banjir ini hampir terjadi tiap tahun dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, bencana banjir besar terjadi di beberapa kecamatan di Kota Padang yang meliputi Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Utara. Hingga saat ini, kejadian bencana banjir masih melanda beberapa kawasan di Kota Padang, seperti bencana banjir yang terjadi pada tanggal 02 November 2018 yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Daerah Terdampak Banjir
02 NOVEMBER 2018**

No.	Lokasi Terdampak	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	RW 08 Perumnas Alai	Bungus Barat	Bungus Teluk Kabung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 80 cm s/d 100 cm Mengancam 1.500 Jiwa (240 KK)
2	RT 02 RW 04 Jarwai Simpang 4 Bungus	Bungus Barat	Bungus Teluk Kabung	<ul style="list-style-type: none"> 1 anak hanyut terbawa arus air (meninggal dunia)
3	Kompelk Arai Pinang	Pegambiran Ampalu	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 30 s/d 40 cm
4	Komplek Griya Elok	Pegambiran Ampalu	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 30 s/d 40 cm
5	Batung Taba	Batung Taba	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 70 s/d 100 cm

No.	Lokasi Terdampak	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
6	Perumahan Gurun Laweh	Gurun Laweh	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 70 s/d 100 cm
7	RT 01 RW 04	Koto Baru	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 30 s/d 40 cm 50 KK Terdampak banjir
8	Depan PAUD Wisma Utama, Ujung Tanah	Gurun Laweh	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 30 cm s/d 50 cm Mengancam 9 KK
9	RT 01 RW 03	Banuaran	Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> 2 unit rumah hanyut terbawa arus Kerugian : Rp. 300.000.000
10	Alai Kapalo Koto	Kapalo Koto	Pauh	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 30 s/d 50 cm
11	RT 02 RW 02	Beringin	Lubuk Kilangan	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit rumah hanyut terbawa arus Kerugian : 150.000.000
12	RT 06 RW 01	Tarantang	Lubuk Kilangan	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 60 s/d 70 cm 15 unit rumah terdampak banjir
13	RT 02 RW 02	Beringin	Lubuk Kilangan	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 60 s/d 70 cm Masyarakat terdampak 25 KK dan 10 Jiwa
14	Alai	Alai Parak Kopi	Padang Utara	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 80 cm 1 unit rumah hanyut terbawa arus. Kerugian: Rp.160.000.000
15	RT 01-05 RW 11 Kampung Pinang	Alai Parak Kopi	Padang Utara	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 80 cm Masyarakat terdampak 650 KK
16	RT 13 RW 03 Kampung Halaman	Alai Parak Kopi	Padang Utara	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air hingga \pm 70 cm Masyarakat terdampak 20 KK
17	RT 03 RW 07	Seberang Padang	Padang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 80 s/d 100 cm
18	RT 02 RW 03	Seberang Palinggam	Padang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 40 s/d 60 cm
19	RT 02 RW 04	Seberang Padang	Padang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian air \pm 80 s/d 100 cm 200 rumah terdampak
20	Depan PT Sampoerna	Air Pacah	Koto Tengah	<ul style="list-style-type: none"> 1 anak hanyut terbawa arus air (meninggal dunia)
21	Jembatan Baringin Panjang 30 meter	Baringin	Lubuk Kilangan	<ul style="list-style-type: none"> Terputusnya akses penyebrangan masyarakat Estimasi kerugian \pm Rp

No.	Lokasi Terdampak	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
	Lebar 7 meter			4.000.000.000,-
22	Lubuk Hitam Cindakir Panjang 25 meter Lebar 5 meter	Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya akses penyebrangan masyarakat • Estimasi kerugian ± Rp 3.000.000.000,-

Sumber : Pusdalops PB BPBD Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas, dampak buruk dari bencana banjir tersebut tergolong besar karena banyaknya daerah yang terdampak dan besarnya kerugian kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana, pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang lebih dan mempunyai tujuan melindungi masyarakatnya harus membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat ditanggulangi. Langkah tersebut adalah dengan adanya lembaga/badan, atau organisasi yang diberi tugas oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kebencanaan.

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana yang ada di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Badan yang berada di tingkat pusat. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan merupakan realisasi pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan lembaga ini adalah amanat dari pasal 18 undang-

undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Badan yang dibentuk tersebut bertugas untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kebencanaan yang terjadi di daerah masing-masing dan diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing.

Badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah dalam penanggulangan bencana khususnya di Kota Padang adalah BPBD Kota Padang. Badan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 18 tahun 2008 pada bab IV pasal 9 menerangkan bahwa unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, pasal 10 menjelaskan bahwa fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang PUSDALOPS-PB, Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan sektor-sektor lain yang dianggap penting

dalam penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kemudian koordinasi menurut Awaludin Djamil dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Jadi, koordinasi dapat diartikan sebagai usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Dengan demikian, untuk menjalankan fungsi koordinasi, BPBD harus menjalankan perannya dalam mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kota Padang dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Hal ini karena BPBD adalah sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Artinya, BPBD adalah sektor penggerak yang menggerakkan sektor sektor lain dalam melakukan penanggulangan bencana dengan menjalin hubungan kerja sama antar semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah koordinator penanggulangan bencana yang berkoordinasi dengan *Stakeholders* atau para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. *Stakeholders* penanggulangan bencana tersebut antara lain seperti : Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas tata

ruang dan tata bangunan, Dinas pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan instansi pemerintahan lainnya.

Selain itu, beberapa instansi vertikal yang juga menjadi bagian dalam penanggulangan bencana di Kota Padang seperti TNI/POLRI, BNPP, dan BMKG. Adapun peranan lembaga kemanusiaan seperti PMI dan peranan BUMN/BUMD seperti Telkom, PDAM, dan PLN, serta pihak lain yang penting keterlibatannya adalah masyarakat dan perguruan tinggi. Kemudian juga terlibatnya peran dunia usaha dan sektor produksi yang ada di Kota Padang. Semua pihak yang terlibat tersebut sudah punya peranan dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Khusus untuk fase tanggap darurat para pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang terlibat adalah seperti Dinas Sosial, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), dan Palang Merah Indonesia (PMI). Dimana masing-masingnya bekerjasama dengan BPBD Kota Padang. Peranan BPBD Kota Padang adalah mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kota Padang. Sedangkan peranan Dinas Sosial Kota Padang adalah merencanakan, dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistic (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana. Kemudian peranan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) adalah melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana alam. Dan peran Palang Merah Indonesia (PMI) adalah

melakukan evakuasi korban Pertolongan pertama, Penampungan darurat, Pendirian dapur umum, Penyediaan air bersih dan sanitas, Relief.

Setiap *stakeholders* mempunyai peranan masing masing dalam penanggulangan bencana, terutama pada fase tanggap darurat. Disini BPBD merupakan koordinator yang berperan dalam mengkoordinir semua *stakeholders* penanggulangan bencana ketika fase tanggap darurat.

Namun dalam pelaksanaannya, peran BPBD Kota Padang dalam melakukan koordinasi dengan *Stakeholders* penanggulangan bencana masih dinilai kurang optimal. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di kantor BPBD Kota Padang pada tanggal 24 September 2018 yang mengatakan bahwa :

“Peranan dan tupoksi masing-masing instansi yang terlibat sudah jelas dan tertera di dalam dokumen RPB, namun masih terdapat tumpang tindih peran yang dikarenakan ketidakpahaman instansi terkait terhadap tugas mereka masing-masing sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peran yang sebenarnya dengan tindakan yang dilakukannya di lapangan. Contohnya seperti ketika banjir yang terjadi pada bulan maret 2016 di Padang Selatan. PMI, Dinas Sosial, dan BPBD sama sama menyalurkan air bersih, sedangkan kebutuhan dapur umum belum tercover seluruhnya oleh Dinas Sosial. Seharusnya Dinas Sosial fokusnya ke dapur umum dan air bersih disalurkan oleh BPBD dan PMI”

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masing masing instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana belum semuanya memahami peranannya sehingga ketika di lapangan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya. Permasalahan tersebut juga berakibat

terjadinya penumpukan logistik di daerah tertentu seperti di Padang Selatan, sedangkan di daerah lain yang juga terdampak bencana banjir kekurangan logistik seperti Kecamatan Koto Tangah yang kekurangan air bersih. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu kerja sama yang baik antar lembaga yang terlibat dengan pembagian tugas secara jelas. Semua instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini harus memahami apa tugas inti yang harus mereka lakukan ketika bencana terjadi agar tindakan yang mereka lakukan tidak tumpang tindih. Hal ini tak lepas dari fungsi BPBD sebagai *leading sector* atau koordinator yang mengkoordinasikan semua instansi yang terlibat dengan memberikan pedoman dan arahan terkait peranan masing masing instansi. Namun disini peran BPBD sebagai *leading sector* kurang memberikan penjelasan kepada sektor sektor lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana terkait dengan peranannya masing-masing. Hal ini dikarenakan kurang dilakukannya sosialisasi secara merata kepada semua instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana seperti yang dikatakan oleh direktur eksekutif kogami yang mengatakan bahwa :

“Setelah rencana kontijensi dibuat, sosialisasinya tidak merata ke seluruh instansi terkait, padahal instansi itu punya peranan. Mereka user, mereka yang akan mendisplay Sumber Daya Manusia, juga peralatan, tapi mereka sendiri tidak tahu bidang tugas mereka apa sehingga ketika terjadi bencana pelaku sebenarnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena mereka tidak ikut”.

Berdasarkan keterangan di atas, seharusnya BPBD sebagai *leading sector* melakukan sosialisasi secara merata dan memberikan informasi yang

jelas agar tugas yang diemban masing masing sektor dapat dilakukan secara efektif dan bantuan yang diberikan tepat dan merata.

Selanjutnya ibu Patra Rina Dewi (Direktur Eksekutif Kogami) juga mengatakan bahwa :

“Fungsi BPBD sangat lemah. BPBD hanya menjalankan fungsi koordinasi dan itupun masih luput. Mereka punya rapat koordinasi, rapat koordinasi tahunan, rapat koordinasi pemko Padang. Tapi tidak berbau rapat, jadi hanya berbau pemaparan dari narasumber, mereka hanya dengar. Ada diskusi tetapi hanya satu arah, seharusnya dalam rapat itu multi arah, ini lebih banyak narasumber misalnya dari kalaksa BPBD Kota Padang, dari kodim, dari polres, dari PMI, hanya memaparkan begitu saja tidak ada rumusan apa apa dan hasil rapat tidak dijadikan acuan. Masih kayak seminar”.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa fungsi BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana masih lemah. Pola pengelolaan kegiatan tidak terstruktur dan hasil rapat koordinasi bersama dengan pihak pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana tidak dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kerja sama antara BPBD dengan instansi-instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Seharusnya BPBD sebagai koordinator dapat menjadikan rapat koordinasi yang diadakan tersebut sebagai pembahasan terkait hubungan kerjasama antar instansi yang terlibat dan hasil rapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kerjasama antar instansi karena setiap instansi saling membutuhkan dalam penanggulangan bencana.

Kemudian menurut kepala sub bagian umum di kantor pencarian dan pertolongan Padang, mengatakan bahwa hubungan kerjasama antara BPBD

dengan BASARNAS lancar-lancar saja, hanya adanya keterlambatan informasi dan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga pada saat gempa 2009 yang lalu proses evakuasi lambat dikarenakan kekurangan alat berat.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa adanya keterlambatan informasi. Seharusnya BPBD sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana harus cepat tanggap dalam menghadapi bencana dengan menjalankan fungsi koordinasinya. Meskipun masing masing instansi yang terlibat sudah tau akan tugasnya dan bergerak tanpa menunggu informasi tetapi BPBD sebagai koordinator harus cepat menyampaikan informasi kepada semua instansi yang terlibat karena BPBD adalah sebagai sektor penggerak dalam penanggulangan bencana. BPBD itu sendiri juga mempunyai PUSDALOPS PB yang berperan mengumpulkan informasi dan menyampaikan informasi. Kemudian masalah lain adalah proses evakuasi lambat dikarenakan kekurangan alat berat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari kepala seksi kedaruratan BPBD Kota Padang yang mengatakan bahwa BPBD belum mempunyai alat berat sehingga harus berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan Dinas PU atau pihak lainnya yang mempunyai alat berat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut maka diperlukan perbaikan pada koordinasi dalam melakukan penanggulangan bencana di Kota Padang. Caranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang serta memberikan pemahaman akan tugas masing

masing *stakeholders*. Maka pada kesempatan ini penulis tertarik dan ingin melakukan suatu penelitian dengan harapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang dapat berjalan dengan efektif . Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Melakukan Koordinasi antar *Stakeholders* Penanggulangan Bencana di Kota Padang”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang berjalannya peran BPBD Kota Padang sebagai *Leading Sector* dalam penanggulangan bencana di Kota Padang.
2. Terjadinya tumpang tindih peran antar instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana sehingga pembagian logistik tidak merata
3. Tidak adanya sosialisasi secara merata yang dilakukan BPBD sehingga instansi yang terlibat tidak memahami peranannya masing masing.
4. Fungsi koordinasi yang dilakukan BPBD Kota Padang masih lemah
5. Adanya keterlambatan informasi dan keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat berat untuk evakuasi korban .

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang. Peneliti membatasi *stakeholders* yang dimaksud disini adalah Dinas Sosial Kota Padang, Badan Pencarian dan Pertolongan Padang, dan PMI Kota Padang. Kemudian peneliti juga membatasi fase penanggulangan bencana yaitu pada fase tanggap darurat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang?
2. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *Stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang untuk meningkatkan fungsi koordinasi antar *Stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan Koordinasi antar *Stakeholders* penanggulangan bencana .
2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan koordinasi antar *Stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam meningkatkan fungsi koordinasi antar *Stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara terutama pada matakuliah Manajemen Kebencanaan.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti yaitu memberikan pemahaman khususnya terkait dengan masalah koordinasi antar *stakeholders* penanggulangan bencana di Kota Padang .

- b. Manfaat bagi instansi terkait adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan kepada instansi terkait agar lebih maksimal dalam wewenang dan tanggungjawabnya
- c. Manfaat bagi pembaca atau masyarakat adalah penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, wawancara dan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di Kota Padang.